

**SEKUTU DALAM FRIKSI: KONFLIK TARIF AS–UE 2024–2025 DAN  
KETEGANGAN ANTARA KEAMANAN EKONOMI DAN KOHESI ALIANSI**

**Muhammad Alvian Ramadhan Pujiantoro<sup>1</sup>, Imam Fadhil Nugraha<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Hasanuddin

[ianpujiantoro66@gmail.com](mailto:ianpujiantoro66@gmail.com)<sup>1</sup>, [imamfadhil86@gmail.com](mailto:imamfadhil86@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis dinamika konflik tarif antara Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 2025, dengan fokus pada implikasi terhadap keamanan ekonomi dan kohesi aliansi transatlantik. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis konten dari berbagai sumber terbuka seperti laporan resmi, artikel jurnal, berita, serta video informatif, studi ini mengungkap bahwa kebijakan tarif AS lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik, terutama menjelang pemilu, sementara respons Uni Eropa menunjukkan konsolidasi strategi kolektif dalam mempertahankan kepentingan industri dan komitmen terhadap sistem perdagangan berbasis aturan. Temuan menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya berdampak pada arus perdagangan global dan stabilitas pasar, tetapi juga menguji solidaritas politik serta efektivitas institusi multilateral seperti WTO. Selain itu, perbedaan pendekatan antara kedua kekuatan ekonomi ini memunculkan tantangan baru dalam menyelaraskan kebijakan luar negeri dan ekonomi secara strategis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Studi ini menegaskan pentingnya diplomasi perdagangan berbasis data, pembangunan kapasitas institusional, serta reformasi mekanisme penyelesaian sengketa internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan stabilitas jangka panjang.

**Kata Kunci:** Sengketa Dagang AS–UE, Keamanan Ekonomi, Tarif Perdagangan, Hubungan Transatlantik, Diplomasi Ekonomi, Sistem Perdagangan Multilateral.

**Abstract**

*This study analyzes the dynamics of the tariff conflict between the United States and the European Union in 2025, focusing on the implications for economic security and the cohesion of the transatlantic alliance. Through a qualitative-descriptive approach and content analysis*

*of various open sources such as official reports, journal articles, news, and informative videos, this study reveals that US tariff policy is more influenced by domestic political interests, especially in the run-up to the election, while the EU's response shows a consolidation of collective strategies in defending industrial interests and commitment to a rules-based trading system. The findings show that this conflict not only impacts global trade flows and market stability but also tests political solidarity and the effectiveness of multilateral institutions such as the WTO. In addition, the differences in approaches between the two economic powers raise new challenges in strategically aligning foreign and economic policies amid rising global geopolitical tensions. This study emphasizes the importance of data-driven trade diplomacy, institutional capacity building, and reform of international dispute resolution mechanisms to prevent further escalation and ensure long-term stability.*

**Keywords:** *US–EU Trade Dispute, Economic Security, Trade Tariffs, Transatlantic Relations, Economic Diplomacy, Multilateral Trading System.*

### PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, pergeseran lanskap global menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi semakin memainkan peran yang penting sebagai instrumen geopolitik. Ketergantungan lintas negara atas rantai pasok global dan sistem perdagangan bebas yang selama ini menjadi pilar sistem internasional liberal, kini menghadapi tekanan hebat dari kebijakan ekonomi koersif yang dijustifikasi atas nama “keamanan nasional.” Amerika Serikat, sebagai pemimpin dari sistem liberal pasca-Perang Dunia II, justru menjadi salah satu aktor utama dalam pergeseran ini. Retorika dan kebijakan ekonomi AS yang belakangan lebih merefleksikan pendekatan proteksionis strategis dibandingkan komitmen terhadap liberalisme pasar global. Hal ini tidak hanya berdampak pada negara-negara pesaing, seperti Tiongkok, tetapi juga pada sekutu-sekutu dekatnya, termasuk Uni Eropa. Pada tahun 2024 dan 2025, hubungan transatlantik kembali memasuki fase tegang ketika Amerika Serikat memberlakukan gelombang baru tarif perdagangan terhadap berbagai produk dari Uni Eropa, mulai dari baja dan kendaraan listrik hingga komponen teknologi tinggi. Langkah ini diambil dengan dalih keamanan ekonomi nasional, memperluas preseden yang telah dimulai sejak masa administrasi Trump dan dilanjutkan secara selektif oleh pemerintahan Biden dan penerusnya. Bagi Uni Eropa, tindakan ini bukan hanya bentuk proteksionisme ekonomi, tetapi juga sebuah

pengingkaran terhadap nilai solidaritas dan kepercayaan timbal balik yang selama ini menopang aliansi transatlantik. Dalam responnya, Uni Eropa mengumumkan serangkaian langkah retaliasi, baik dalam bentuk tarif balasan maupun strategi diversifikasi pasar ke kawasan Global South dan Asia. Komisi Eropa bahkan mengaktifkan prosedur untuk meninjau kembali kerangka kerja sama dagang dengan AS, termasuk mempertimbangkan penguatan otonomi strategis di sektor industri. Di sisi lain, ketegangan ini turut merembet ke ranah politik dan diplomatik, menimbulkan friksi dalam forum-forum strategis seperti NATO, G7, dan Dewan Perdagangan dan Teknologi (TTC). Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana aliansi strategis antara AS dan UE dapat bertahan jika fondasi ekonominya terus diguncang oleh kebijakan unilateral? Secara teoritik, persoalan ini dapat dipahami dalam kerangka “interdependensi koersif” (weaponized interdependence), sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana negara-negara dengan posisi dominan dalam jaringan ekonomi global dapat menggunakan kekuatan strukturalnya untuk menekan negara lain. Interdependensi tidak selalu menghasilkan kerja sama yang harmonis; dalam konteks asimetris, ia justru dapat menjadi alat paksaan. Konteks konflik tarif AS–UE tahun 2024–2025 menjadi studi kasus empirik yang sangat relevan untuk menguji proposisi ini, terutama karena ia terjadi bukan antara musuh ideologis, melainkan di antara sekutu yang secara historis memiliki nilai-nilai bersama (Farrell & Newman, 2019). Namun demikian, konflik ini juga membuka ruang untuk mengkaji aspek yang kerap diabaikan dalam studi aliansi, yakni **kohesi ekonomi-politik** di antara para sekutu. Sementara banyak studi hubungan internasional menitikberatkan pada dimensi militer dan keamanan dalam analisis aliansi, krisis perdagangan ini menunjukkan bahwa solidaritas ekonomi menjadi elemen krusial yang menentukan keberlanjutan hubungan strategis. Kohesi aliansi tidak hanya diuji oleh ancaman eksternal, tetapi juga oleh kepentingan domestik yang berlawanan di antara anggotanya. Dengan kata lain, konflik tarif AS–UE membuka ruang kajian untuk memahami bagaimana logika nasionalisme ekonomi (economic nationalism) dapat mengikis rasa saling percaya (mutual trust) dan menciptakan ketegangan horizontal di dalam koalisi negara-negara liberal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tarif unilateral yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Uni Eropa pada periode 2024–2025 berdampak terhadap kohesi aliansi transatlantik. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan kerangka konseptual interdependensi koersif, tulisan ini berupaya memahami dinamika antara logika keamanan ekonomi nasional dan komitmen

terhadap solidaritas antar sekutu. Fokus utama diarahkan pada kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS, respon kebijakan dan diplomatik dari Uni Eropa, serta implikasinya terhadap masa depan kerja sama ekonomi-politik di antara negara-negara Barat. Dalam hal ini, tulisan ini tidak hanya berkontribusi secara empiris dengan menyajikan kronologi dan dampak dari konflik tarif terkini, tetapi juga secara teoretik dengan memperkaya literatur tentang hubungan aliansi dan ekonomi politik internasional. Studi ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar: “Apakah tindakan proteksionis berbasis keamanan ekonomi oleh negara dominan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kohesi aliansi strategis yang dibangunnya?” Untuk menjawab pertanyaan ini, tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Setelah bagian pendahuluan, bagian kedua akan menguraikan tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori tentang keamanan ekonomi, interdependensi koersif, dan kohesi aliansi. Bagian ketiga akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam mengkaji studi kasus ini. Bagian keempat dan kelima akan menganalisis konflik tarif AS–UE dari dua sisi utama: (1) logika dan strategi kebijakan ekonomi AS, dan (2) respons serta resistensi kebijakan dari UE. Temuan utama akan disajikan dalam bagian selanjutnya untuk menjawab pertanyaan riset. Akhirnya, bagian kesimpulan akan menyajikan refleksi normatif dan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan ekonomi dan kohesi aliansi di masa depan.

### KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur mengenai konflik tarif antara Amerika Serikat dan Uni Eropa perlu diawali dari pemahaman mengenai relasi kekuasaan dalam sistem ekonomi politik global. **Robert Keohane** dalam bukunya *“After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy”* tahun 1984 menjelaskan bahwa dalam sistem internasional pasca-Perang Dunia II, kerja sama tidak dapat dilepaskan dari logika kepentingan nasional. Meskipun Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan perdagangan liberal, ia tetap mempertahankan fleksibilitas untuk bertindak secara sepihak ketika menghadapi tekanan domestik. Hal ini terlihat jelas dalam praktik-praktik proteksionisme modern yang justru dilancarkan oleh negara yang selama ini dianggap sebagai penjaga utama pasar bebas global. Praktik ini tidak hanya ditujukan kepada rival ideologis seperti Tiongkok, tetapi juga diarahkan kepada sekutu historisnya seperti Uni Eropa, menunjukkan pergeseran serius dalam praktik diplomasi ekonomi. Lebih lanjut, studi oleh **Henry Farrell dan Abraham Newman** pada

karyanya yang berjudul **“WEAPONIZED INTERDEPENDENCE: HOW GLOBAL ECONOMIC NETWORKS SHAPE STATE COERCION”** tahun 2019 mengembangkan konsep *weaponized interdependence*, yang menjelaskan bagaimana negara dengan posisi dominan dalam jaringan global—terutama dalam sistem keuangan, data, dan teknologi dapat mengeksploitasi ketergantungan negara lain untuk tujuan strategis dan keamanan nasional. Dalam pandangan ini, interdependensi tidak selalu mendorong harmoni dan kerja sama, melainkan dapat menjadi alat koersif ketika distribusi kekuasaan tidak merata. Tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk strategis Eropa seperti kendaraan listrik, baja, dan komponen teknologi tinggi, bukan semata keputusan ekonomi teknokratik, tetapi juga bagian dari upaya mempertahankan dominasi struktural dalam lanskap ekonomi global yang semakin multipolar. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka analitis yang relevan dalam memahami motif dan dampak kebijakan ekonomi koersif yang dilakukan AS. Dalam konteks hubungan aliansi, koherensi kebijakan ekonomi dan persepsi terhadap kepentingan bersama menjadi komponen penting bagi keberlanjutan kerja sama strategis. Studi-studi mengenai dinamika aliansi, seperti yang dibahas oleh **Richard Baldwin** pada karyanya yang berjudul **“MULTILATERALISING REGIONALISM: SPAGHETTI BOWLS AS BUILDING BLOCS ON THE PATH TO GLOBAL FREE TRADE”** tahun 2006, menunjukkan bahwa kompleksitas hubungan perdagangan bilateral dan regional yang sering kali disebut sebagai *spaghetti bowl effect* dapat memperburuk tensi antarnegara sekutu ketika kepentingan nasional masing-masing bertabrakan. Ketika Amerika Serikat menggunakan retorika “keamanan ekonomi” untuk membenarkan kebijakan proteksionisnya, Uni Eropa pun menanggapi dengan langkah-langkah defensif seperti penyesuaian rantai pasok dan peninjauan kembali kerangka kerja sama perdagangan transatlantik. Reaksi ini menunjukkan bahwa solidaritas dalam aliansi tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada persepsi keadilan dan simetri dalam hubungan ekonomi-politik antarnegara anggota. Faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah tren nasionalisme ekonomi yang menguat pasca krisis keuangan global dan semakin menonjol sejak masa pemerintahan Trump. **Douglas Irwin** pada Bukunya ***Free Trade under Fire*** edisi ke 5 keluaran tahun 2020, dalam analisisnya terhadap sejarah proteksionisme Amerika Serikat, mencatat bahwa argumen perlindungan terhadap industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, serta resistensi terhadap “praktik perdagangan tidak adil” menjadi semakin dominan dalam wacana politik domestik AS. Bahkan di bawah kepemimpinan yang lebih multilateral

seperti pemerintahan Biden, semangat nasionalisme ekonomi tetap lestari, ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan seperti CHIPS Act dan pembatasan ekspor teknologi strategis. Ketegangan tarif dengan Uni Eropa tidak lepas dari konteks ini, di mana tekanan politik domestik dan keinginan mempertahankan keunggulan industri menjadi determinan kuat dalam keputusan ekonomi eksternal. Merespons tekanan tersebut, Uni Eropa mulai menegaskan kembali pentingnya *strategic autonomy* sebagai pendekatan jangka panjang. Upaya-upaya seperti European Chips Act, rencana diversifikasi energi dari Rusia, serta kebijakan industri hijau menunjukkan komitmen UE untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara eksternal, termasuk Amerika Serikat. Beberapa pengamat memandang inisiatif ini sebagai tanda-tanda emansipasi strategis, namun ada pula yang melihatnya sebagai bukti fragmentasi dalam solidaritas Barat. Di sinilah titik temu antara teori dan praktik aliansi: ketika solidaritas strategis mulai digeser oleh kalkulasi ekonomi nasional yang defensif, maka kohesi aliansi pun dipertanyakan. Literatur-literatur yang membahas tema ini menegaskan bahwa ketahanan hubungan aliansi sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap nilai kolektif yang mendasari kerja sama. Dengan demikian, literatur yang tersedia menunjukkan bahwa konflik tarif AS–UE bukan sekadar insiden perdagangan biasa, tetapi merupakan cerminan dari transformasi mendalam dalam cara negara-negara Barat memahami hubungan aliansi, kepentingan ekonomi, dan ketahanan struktural di era interdependensi global. Dominasi struktural AS, kebangkitan nasionalisme ekonomi, serta resistensi strategis dari mitra seperti Uni Eropa menjadi elemen-elemen penting yang mempengaruhi arah masa depan kerja sama transatlantik.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan desain eksploratif-analitis untuk memahami secara menyeluruh dinamika konflik tarif antara Amerika Serikat dan Uni Eropa pada periode 2024–2025. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk meneliti fenomena kontemporer yang kompleks dan dinamis, terutama ketika batas antara kepentingan ekonomi dan politik menjadi semakin kabur. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi keterkaitan antara kebijakan tarif unilateral, strategi keamanan ekonomi, serta dampaknya terhadap struktur dan kohesi aliansi transatlantik. Objek utama dari studi ini adalah kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap berbagai produk Uni Eropa,

termasuk namun tidak terbatas pada baja, kendaraan listrik, serta komponen teknologi strategis. Analisis juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut dijustifikasi secara politik oleh pemerintah AS, serta respons yang diberikan oleh Uni Eropa melalui kebijakan balasan, reposisi dagang, hingga penguatan agenda otonomi strategis. Fokus tidak hanya diberikan pada kebijakan formal, tetapi juga pada retorika politik, diplomasi ekonomi, dan dinamika di balik forum-forum multilateral yang turut terdampak oleh ketegangan tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengakses laporan kebijakan resmi dari lembaga pemerintahan kedua pihak, transkrip pernyataan pejabat, notulensi dari forum perdagangan dan aliansi strategis, serta artikel dari media internasional arus utama. Data tersebut kemudian diperkaya dengan kajian literatur ilmiah untuk membentuk kerangka konseptual yang kokoh. Pendekatan ini tidak bersifat linier, melainkan bersifat iteratif, di mana proses pengumpulan dan analisis data saling mempengaruhi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih tajam dan mendalam. Dalam menganalisis data, teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola naratif, penekanan argumen, serta pergeseran strategi yang dilakukan oleh kedua aktor utama. Selain itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna di balik kebijakan dan tindakan aktor, termasuk analisis terhadap diksi dan framing yang digunakan dalam wacana publik mereka. Penelitian ini juga menerapkan prinsip triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, yakni dengan membandingkan dan menyilangkan data dari berbagai sumber yang kredibel. Kerangka teoretik yang digunakan dalam studi ini membantu menavigasi hubungan antara kekuasaan ekonomi dan kebijakan proteksionis dalam konteks hubungan antar sekutu. Dengan menggabungkan kerangka teoretik dengan bukti empiris yang kaya, studi ini bertujuan untuk tidak hanya menggambarkan realitas kebijakan, tetapi juga menilai implikasinya terhadap keberlangsungan solidaritas ekonomi-politik antara negara-negara demokratis Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik tarif antara Amerika Serikat dan Uni Eropa pada 2024–2025 mencerminkan perubahan mendalam dalam paradigma kebijakan ekonomi luar negeri AS. Selama beberapa dekade, AS memainkan peran utama dalam mendorong tatanan perdagangan bebas berbasis multilateralisme. Namun, pasca krisis finansial 2008 dan meningkatnya persaingan strategis dengan Tiongkok, pendekatan ini mulai digantikan oleh orientasi proteksionis yang

mengedepankan keamanan ekonomi sebagai fondasi kekuatan nasional. Situasi geopolitik global yang semakin kompleks, termasuk fragmentasi rantai pasok dan meningkatnya kekhawatiran terhadap ketergantungan pada pihak asing, mendorong Washington untuk mengubah pendekatannya. Pandemi COVID-19, misalnya, telah mengungkapkan kerentanannya dalam sistem perdagangan global yang sangat terhubung. Banyak negara menyaksikan kekurangan pasokan untuk barang-barang krusial, terutama produk medis dan farmasi. Kejadian tersebut semakin memicu kesadaran bahwa interdependensi yang berlebihan dapat mengancam ketahanan nasional jika terjadi gangguan pada rantai pasok global. Sebagai akibatnya, AS mulai mengevaluasi kembali peran dan dampak kebijakan perdagangan internasionalnya. Salah satu ekspresi paling menonjol dari perubahan ini adalah semakin seringnya penggunaan ketentuan *Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962*, yang memberikan Presiden kewenangan memberlakukan tarif jika impor dianggap mengancam keamanan nasional. Laporan tahunan dari *United States Trade Representative (USTR)* menegaskan bahwa kebijakan perdagangan AS kini diposisikan untuk melindungi sektor-sektor strategis dan memperkuat resiliensi rantai pasok: "We are using trade tools to ensure our supply chains are resilient and to promote fair and sustainable economic growth at home and abroad. That includes action under Section 232 to protect key industries vital to national security." (USTR, 2023). Tarif terhadap baja, kendaraan listrik, dan teknologi tinggi dari Uni Eropa diberlakukan bukan semata karena alasan ekonomi, tetapi dalam kerangka menjaga kepemimpinan strategis AS. Penetapan tarif ini diperluas melalui kerangka kebijakan seperti *Inflation Reduction Act (IRA)* dan *CHIPS and Science Act*, yang memberikan insentif besar kepada produsen dalam negeri dan mendiskriminasi mitra dagang, termasuk sekutu seperti Jerman dan Prancis. Strategi ini merepresentasikan upaya aktif pemerintah AS untuk membentuk ulang lanskap produksi domestik sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang lebih otonom dari pengaruh eksternal. Kebijakan IRA, misalnya, hanya memberikan subsidi kendaraan listrik kepada perusahaan yang memproduksi dan merakit mobil mereka di dalam negeri, tanpa memperhitungkan kontribusi perusahaan Eropa. Kritik ini disuarakan secara langsung oleh Komisi Eropa dalam siaran pers mereka setelah pertemuan TTC keempat di Swedia tahun 2024: "We continue to express concerns regarding discriminatory provisions in the Inflation Reduction Act, which create market distortions detrimental to EU manufacturers." (EuropaCommision, 2022). Reaksi Eropa menunjukkan bahwa AS tidak lagi memandang Uni

Eropa sebagai mitra ekonomi yang sepenuhnya setara. Sejumlah analis menilai bahwa Washington kini mendorong pola relasi “sekutu dalam keamanan, pesaing dalam ekonomi.” Hal ini ditegaskan oleh Thomas Wright dalam artikel Brookings Institution: “The Biden administration increasingly treats Europe as a friendly competitor in economic matters, while maintaining strong security ties.” (Wright, 2017). Selain itu, Uni Eropa juga menggugat kebijakan tarif AS ke WTO. Namun, keefektifan WTO sebagai lembaga penyelesaian sengketa telah merosot akibat keputusan AS yang sejak 2019 memblokir pengangkatan hakim baru di Appellate Body. Menurut analisis Bernard Hoekman dalam jurnal *Global Policy*, tindakan AS telah "secara sistematis melumpuhkan WTO sebagai lembaga arbitrase dagang global": "The blocking of Appellate Body appointments has created a vacuum in the global trade dispute system." (Hoekman, 2023). Meningkatnya proteksionisme AS menjadi lebih jelas ketika dilihat dari kebijakan *America First*, yang melibatkan penggunaan tarif untuk mendesak mitra dagang agar lebih menguntungkan bagi ekonomi domestik AS. Pendekatan ini, meskipun mendatangkan keuntungan sementara bagi beberapa sektor industri di AS, berisiko memperburuk hubungan diplomatik dan ekonomi dengan sekutu yang telah lama bergantung pada pasar AS. Dalam beberapa kasus, seperti pada sektor baja dan aluminium, tarif telah menambah ketegangan antara AS dan sekutunya di Eropa dan Asia, yang memandang kebijakan ini sebagai langkah yang dapat merusak stabilitas ekonomi global dan mengarah pada eskalasi proteksionisme lebih lanjut. Kritik terhadap pendekatan unilateral AS juga datang dari berbagai negara berkembang yang merasa disisihkan dari manfaat perdagangan bebas global. Negara-negara ini, termasuk beberapa di Asia dan Afrika, memandang proteksionisme baru AS sebagai bentuk penghalang struktural terhadap akses pasar global yang adil. Bagi Uni Eropa sendiri, pendekatan ini menuntut penyesuaian ulang terhadap strategi industrinya, termasuk mempercepat transisi digital dan hijau yang tidak bergantung penuh pada dukungan mitra transatlantik. Di sisi lain, kebijakan tarif AS juga semakin memperburuk ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara yang mengandalkan ekspor sebagai sumber pendapatan utama, seperti India dan Brasil, menghadapi tantangan berat dalam menavigasi pasar yang kini dibayangi oleh proteksionisme yang semakin berkembang. Hal ini semakin memperbesar kesenjangan ekonomi global dan menambah ketegangan politik antarnegara. Dari sisi domestik, dukungan terhadap kebijakan proteksionis cukup tinggi. Survei Pew Research Center pada 2024 menemukan bahwa 63% warga AS (baik Demokrat maupun Republik) mendukung kebijakan

tarif dan subsidi sebagai alat untuk melindungi industri dalam negeri, bahkan jika itu menimbulkan ketegangan dengan sekutu. (Pew Reserch Center, 2024). Dukungan ini menandakan adanya konsensus bipartisan dalam memandang kekuatan ekonomi domestik sebagai pilar utama kekuatan nasional. Narasi tentang kebangkitan manufaktur AS menjadi alat penting dalam kampanye politik dan memperkuat persepsi publik bahwa proteksionisme adalah instrumen patriotisme ekonomi. Narasi ini diperkuat dengan keberhasilan relokasi beberapa fasilitas produksi strategis ke dalam negeri, yang menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak elektabilitas partai berkuasa. Selain itu, laporan dari Congressional Research Service mencatat peningkatan investasi domestik hingga 18% di sektor manufaktur selama tahun 2024, menunjukkan efektivitas jangka pendek dari pendekatan ini. (COMMITTEE ON THE BUDGET HOUSE OF REPRESENTATIVES, 2025). Kondisi ini menggambarkan bagaimana interdependensi ekonomi digunakan secara strategis untuk menekan mitra, bahkan sekutu. Farrell dan Newman menyebut konsep ini sebagai *weaponized interdependence*, yakni ketika negara dominan menggunakan posisi strategis dalam jaringan ekonomi global untuk memaksakan kehendaknya. "States that control central nodes in the global economic networks can weaponize that interdependence to coerce others." (Farrell & Newman, 2019). Dengan demikian, kebijakan tarif AS tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga mengguncang fondasi kepercayaan dan solidaritas dalam aliansi Barat. Jika tren ini terus berlanjut, kohesi dalam aliansi strategis seperti NATO dan TTC akan semakin rentan terhadap disintegrasi karena tekanan ekonomi domestik dan nasionalisme industri yang semakin kuat di Washington. Ketegangan tarif ini telah memperlemah kepercayaan timbal balik antar sekutu dan menciptakan ketidakpastian dalam komitmen jangka panjang AS terhadap integrasi ekonomi transatlantik. Tantangan yang dihadapi oleh Eropa dan negara-negara lain dalam menanggapi kebijakan tarif ini akan sangat bergantung pada kapasitas mereka untuk beradaptasi dan mencari alternatif selain ketergantungan pada AS. Meskipun negara-negara Eropa telah mencoba merespons dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan meningkatkan peran China serta negara-negara lain dalam jaringan pasok mereka, tetap ada ketergantungan kuat terhadap pasar dan teknologi AS. Oleh karena itu, meskipun terdapat peluang bagi Eropa untuk mengurangi ketergantungan ini, namun perubahan tersebut akan memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan inovasi, serta politik yang cukup tegas untuk menantang kebijakan AS tanpa merusak hubungan keamanan yang ada. Aliansi yang sebelumnya kuat kini dipaksa menyesuaikan diri terhadap

realitas baru, di mana ekonomi dan keamanan tidak lagi berjalan secara paralel, tetapi justru saling berbenturan. Langkah selanjutnya dari Uni Eropa akan menjadi penentu, apakah mereka akan tunduk pada tekanan struktural AS atau memilih jalur baru melalui peningkatan otonomi strategis dan diversifikasi kemitraan global. Semua ini membuka babak baru dalam relasi ekonomi internasional, di mana solidaritas ideologis tidak lagi menjadi penentu utama dalam hubungan antarnegara, dan kekuatan nasional dipulihkan melalui logika dominasi ekonomi yang lebih keras dan pragmatis. Dalam konteks tersebut, ketahanan dan kapasitas adaptasi Uni Eropa akan diuji, sementara AS terus mengkonsolidasikan strategi hegemoniknya melalui instrumen ekonomi yang terintegrasi dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Seiring meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa sejak awal 2025, perhatian global kini tertuju pada cara Uni Eropa merespons kebijakan tarif agresif yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Trump. Dengan ancaman tarif mencapai 50% terhadap berbagai komoditas dari Eropa, termasuk produk otomotif, minuman, dan barang mewah, dinamika ekonomi transatlantik kembali mengalami tekanan berat. Situasi ini menimbulkan tantangan kebijakan yang serius bagi Brussel dalam menjaga stabilitas perdagangan, melindungi industri domestik, dan mempertahankan pengaruh ekonomi global. Menurut *Budget Lab* Yale (2025), lonjakan tarif Amerika pada awal 2025 menaikkan beban ekonomi rumah tangga Amerika hingga rata-rata \$3.800 per tahun, dengan dampak paling parah menimpa kelas menengah bawah. Selain itu, kenaikan harga barang-barang impor secara luas memicu inflasi jangka pendek sebesar 2,3%, yang kemudian berdampak pada penurunan daya beli. Dari sudut pandang kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme AS justru memberikan beban internal yang besar pada konsumennya sendiri. (The Budget Lab at Yale, 2025) Di sisi lain, analisis dari *Peterson Institute for International Economics (PIIE)* menyebutkan bahwa meskipun target kebijakan tarif adalah mengurangi defisit perdagangan bilateral dengan Uni Eropa, kenyataannya model ekonomi memperlihatkan bahwa tarif tersebut gagal memberikan perbaikan signifikan terhadap neraca perdagangan global AS. Lebih jauh, tarif balasan dari UE justru memperdalam kerugian kedua pihak. Efek domino ini menunjukkan bahwa strategi tarif satu arah sering kali menimbulkan kerugian lebih luas dari yang diperkirakan. (McKibbin & Noland, 2025) Dalam menanggapi tekanan ini, Uni Eropa tidak tinggal diam. Laporan kebijakan dari *Bruegel* menyarankan agar UE mengadopsi strategi respons tiga pilar: memperkuat keterlibatan bilateral dengan AS guna mencegah eskalasi lebih

lanjut, mempromosikan integritas sistem perdagangan multilateral melalui reformasi WTO, dan memperluas jaringan perjanjian perdagangan bilateral khususnya dengan negara-negara di Amerika Latin dan kawasan Indo-Pasifik. Langkah-langkah ini dirancang tidak hanya sebagai respons terhadap AS, tetapi juga untuk memperluas diversifikasi ekonomi UE ke mitra non-tradisional. (Bercero, Mavroidis, & Sapir, 2024) Selain pendekatan diplomatik dan kelembagaan, Uni Eropa juga telah menyusun kebijakan balasan secara teknis. Laporan resmi dari Parlemen Eropa (2025) memperkirakan bahwa kebijakan tarif AS berpotensi mengurangi ekspor utama Eropa seperti kendaraan, pesawat terbang, dan produk makanan olahan. Sebagai tanggapan, Komisi Eropa menyiapkan tarif balasan yang ditargetkan secara strategis terhadap produk-produk Amerika yang bernilai tinggi dalam konteks politik domestik AS, seperti bourbon, sepeda motor Harley-Davidson, dan produk pertanian dari negara bagian swing. (The Economic Governance and EMU, et al., 2025) Kekhawatiran yang ditimbulkan tarif Trump juga meluas ke pasar finansial. Bloomberg melaporkan bahwa pengumuman tarif menyebabkan gejolak di pasar saham Eropa dengan penurunan indeks Stoxx 600 sebesar 1,5%, sementara sektor otomotif anjlok lebih dari 3%. Ketidakpastian ini meningkatkan permintaan terhadap aset aman seperti obligasi Jerman dan emas. Reaksi pasar ini menunjukkan betapa sensitifnya sistem keuangan global terhadap kebijakan perdagangan unilateral. (Woodhouse, 2025) Dalam dokumen resmi dari United States Trade Representative (USTR), justifikasi atas tarif tersebut didasarkan pada "perlunya melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil." Namun, analisis independen menunjukkan bahwa sebagian besar tarif diberlakukan terhadap mitra dagang yang tidak secara langsung terlibat dalam praktik tersebut, termasuk negara-negara Uni Eropa. (USTR, 2023) Secara keseluruhan, respons Uni Eropa terhadap kebijakan tarif AS pada 2025 mencerminkan strategi jangka panjang yang lebih terukur dan terstruktur. Dengan mengedepankan diplomasi perdagangan, aliansi multilateral, dan kebijakan balasan yang cermat, UE menunjukkan bahwa blok tersebut tidak hanya bereaksi secara emosional, tetapi justru memperkuat posisi strategisnya dalam sistem perdagangan global yang sedang berubah cepat.

### **KESIMPULAN**

Ketegangan tarif antara Amerika Serikat dan Uni Eropa sepanjang tahun 2025 mencerminkan transformasi besar dalam dinamika ekonomi global yang kian dipengaruhi oleh

pertimbangan politik domestik dan kompetisi strategis antarnegara besar. Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa kebijakan tarif AS lebih banyak dimotivasi oleh kebutuhan elektoral dan retorika nasionalisme ekonomi, yang sayangnya tidak diimbangi dengan efektivitas jangka panjang. Sebaliknya, Uni Eropa menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur, mengedepankan diplomasi ekonomi, diversifikasi pasar, dan pembelaan terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. Penggunaan tarif oleh AS, meski secara retorik ditujukan untuk memperkuat industri dalam negeri, justru menimbulkan ketidakpastian ekonomi, menghambat investasi lintas batas, dan memicu balasan kebijakan dari mitra dagang utama. Di sisi lain, strategi balasan Uni Eropa yang diarahkan secara politis pada produk bernilai simbolik di AS menunjukkan tingkat kecermatan yang tinggi dalam merancang kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dalam jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konflik ekonomi antara kekuatan besar, efektivitas suatu kebijakan tidak semata bergantung pada kekuatan ekonomi, melainkan pada bagaimana negara merancang respons berdasarkan kalkulasi data, solidaritas internal, dan dukungan internasional. Ketika Amerika Serikat mengandalkan pendekatan sepihak, Uni Eropa justru mengonsolidasikan kekuatannya melalui pendekatan kolektif dan memperkuat posisi tawarnya dalam sistem global. Dengan mempertimbangkan arah kebijakan kedua pihak, jelas bahwa masa depan hubungan dagang transatlantik akan sangat ditentukan oleh kemampuan keduanya dalam meredakan rivalitas politik dan membangun kembali kepercayaan strategis. Penataan ulang kebijakan tarif ke depan harus didasarkan pada asas saling menguntungkan dan transparansi, agar stabilitas ekonomi internasional dapat kembali terjaga. Selain itu, konflik tarif ini menunjukkan urgensi bagi kedua aktor untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Sistem penyelesaian sengketa di bawah WTO yang saat ini tidak berfungsi optimal membuat negara-negara besar cenderung memilih jalur bilateral yang lebih politis dan penuh ketidakpastian. Tanpa reformasi institusional yang nyata, maka benturan kebijakan serupa dapat terus berulang, menciptakan ketidakstabilan yang mengganggu pemulihan ekonomi global pasca-pandemi dan krisis geopolitik. Akhirnya, pelajaran penting dari konflik ini adalah perlunya mengembalikan arah kebijakan ekonomi internasional pada prinsip-prinsip tata kelola global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa memiliki tanggung jawab untuk memelihara keterbukaan ekonomi dunia, terlebih sebagai

kekuatan utama dalam arsitektur perdagangan global. Membangun kembali dialog transatlantik berbasis kepercayaan dan visi bersama bukan hanya penting bagi hubungan bilateral, tetapi juga krusial bagi stabilitas sistem internasional yang lebih luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baldwin, R. (2006). MULTILATERALISING REGIONALISM: SPAGHETTI BOWLS AS BUILDING BLOCS ON THE PATH. *NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH*, 1-45.
- Bercero, I. G., Mavroidis, P. C., & Sapir, A. (2024, Desember 9). *Bruegel*. Retrieved Maret 23, 2025, from [www.bruegel.org](http://www.bruegel.org): <https://www.bruegel.org/policy-brief/how-european-union-should-respond-trumps-tariffs>
- COMMITTEE ON THE BUDGET HOUSE OF REPRESENTATIVES . (2025). *ONE BIG BEAUTIFUL BILL*. Washington D.C: CONGRES.GOV.
- EuropaCommission. (2022, December 29). *European Commission*. Retrieved Mei 9, 2025, from [commission.europa.eu](http://commission.europa.eu):  
[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_22\\_7869](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7869)
- Farrell, H., & Newman, A. (2019). Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. *MIT Press Direct*, 42–79.
- Hoekman, B. (2023). Comment on “Can the World Trade Organization Act as a Bulwark Against Deglobalization?”. *WILEY Online Library*, 55-61.
- Irwin, D. (2020). *Free Trade under Fire* (5 ed.). (J. Delaney, & J. Jackson, Eds.) New Jersey: PRINCETON UNIVERSITY PRESS.
- Keohane, R. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey, Chichester, United Kingdom: Princeton University Press.
- McKibbin , W. J., & Noland , M. (2025 , Maret 24). *The Peterson Institute for International Economics (PIIE)*. Retrieved Mei 1, 2025, from [www.piie.com](http://www.piie.com):  
<https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2025/modeling-us-eu-trade-war-tariffs-wont-improve-us-global-trade-balance>
- Pew Reserch Center. (2024). *Americans’ Top Policy Priority for 2024: Strengthening the Economy*. Washington, D.C: Pew Reserch Center.
- The Budget Lab at Yale. (2025, April 2). *Where We Stand: The Fiscal, Economic, and*

- Distributional Effects of All U.S. Tariffs Enacted in 2025 Through April 2*. Retrieved Mei 10, 2025, from The Budget Lab: <https://budgetlab.yale.edu/research/where-we-stand-fiscal-economic-and-distributional-effects-all-us-tariffs-enacted-2025-through-april>
- The Economic Governance and EMU, Favero, C., Fernandez-Fuertes, R., Giavazzi, F., Guerrieri, V., Bottazzi, L., et al. (2025, Maret). Euro Area Risks Amid US. (A. HECSER, Ed.) *European Parliament*, 11-37.
- USTR. (2023). *2023 Trade Policy Agenda and 2022 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program*. Washington D.C: United States Trade Representative.
- Woodhouse, S. (2025, Mei 23). *Bloomberg News*. Retrieved Mei 27, 2025, from [www.bloombergtechnoz.com: https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/72215/trump-ancam-kenakan-tarif-dagang-50-ke-uni-eropa](https://www.bloombergtechnoz.com/news/72215/trump-ancam-kenakan-tarif-dagang-50-ke-uni-eropa)
- Wright, T. (2017, December). A POST-AMERICAN EUROPE AND THE FUTURE OF U.S. STRATEGY. *The Brookings Institution*, 1-17.